



Judul : Negara Injeksi Modal BUMN Rp 72,45 Triliun
Tanggal : Jumat, 09 Juli 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

Negara Injeksi Modal BUMN Rp 72,45 Triliun

Kondisi keuangan BUMN Karya tertekan karena sulit mendapat kontrak baru dan penjualan, serta penugasan yang berat seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengajukan penyertaan modal negara atau PMN bagi 12 perusahaan sebesar Rp 72.449 triliun untuk tahun anggaran 2022. PMN yang besarnya lebih dari dua kali lipat dari PMN 2021 itu akan digunakan untuk mencatatkan sejumlah perusahaan dan dalam rangka menjalankan penugasan negara.

Perusahaan pelat merah yang akan mendapatkan PMN itu adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 3 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rp 8,231 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 7 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp 31,35 triliun, PT Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero) Rp 9,318 triliun, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp 4,1 triliun. Ada juga PT Bahana Pembangunan Usaha Indonesia (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) yang masing-masing dialokasikan Rp 2 triliun.

Selain itu, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Perum Damri menurut rencana akan menerima masing-masing Rp 1,2 triliun dan Rp 250 miliar.

Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat secara virtual di Jakarta, Kamis (8/7/2021). Rapat kerja tersebut dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Pahlawan Nugraha Mansury.

Dalam kesempatan itu, terungkap juga empat BUMN yang berstatus tidak sehat, yaitu Hutama Karya dan PT Wijaya Karya Tbk, serta sangat tidak sehat, yaitu Waskita Karya dan Perumnas. Sementara BNI, rasio kecukupan modal (CAR) bank tersebut tengah tertekan lantaran berada di level 19,7 persen hingga 16,7 persen sejak 2016 hingga 2020.

"Secara umum, kondisi keuangan BUMN, terutama BUMN Karya, tertekan karena sulit mendapat kontrak baru dan penjualan, serta penugasan yang sangat berat seiring dengan dampak pandemi Covid-19," kata Kartika.

Utang membengkak

Kartika menjelaskan, kondisi keuangan Waskita Karya saat ini tertekan lantaran mengambil alih proyek-proyek pembangunan jalan tol yang tak kelar digarap swasta pada 2015-2016. Hal ini menyebabkan utang Waskita Karya membengkak menjadi Rp 64,942 triliun dan pendapatannya tergerus sebesar 48,42 persen pada 2020.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengusulkan skema restrukturisasi menyeluruh terhadap Waskita Karya dengan dana yang dibutuhkan Rp 22,9 triliun. Sebesar Rp 15 triliun untuk penjaminan penyelesaian proyek-proyek yang sudah ada dan Rp 7,9 triliun untuk memperkuat permodalan.

Adapun Perumnas, lanjut Kartika, pendapatannya pada 2020 turun signifikan sebesar 27,25 persen lantaran melambatnya penjualan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menyebabkan

inventori rumah Perumnas menjadi besar sehingga rasio utang terhadap ekuitas meningkat tajam.

Sementara CAR BNI merupakan yang terendah dibanding bank-bank sejenis dan industri perbankan. Begitu juga untuk komponen modal inti (tier 1) BNI yang kini berada di kisaran 16 persen. Salah satunya disebabkan pertumbuhan modalnya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

"Otoritas Jasa Keuangan telah meminta untuk memperkuat modal tier 1 BNI. BNI juga tengah mengatasi permasalahan rasio kredit bermasalah (NPL). Dalam jangka pendek, BNI juga akan mengajukan *rights issue* senilai total Rp 11,7 triliun," ujar Kartika.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaur mengatakan, dana PMN nantinya akan digunakan untuk memperkuat modal tier 1 supaya sama dengan bank buku empat lainnya. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk ekspansi kredit dan ekspansi anorganik perusahaan.

Kontribusi BUMN

Erick Thohir mengatakan, nilai PMN yang diberikan selama ini jauh lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara. Selama 2011-2020, kontribusi BUMN terhadap negara sebesar Rp 3.295 triliun yang berasal dari pajak penerimaan negara bukan pajak dan dividen. Sementara PMN yang digulirkan pada 2011-2020 senilai total Rp 147 triliun atau hanya sekitar 4 persen dari kontribusi BUMN.

(BKY/HEN/APO)